
ANALISIS EFEK UNMEET NEED KB PEREMPUAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2019**Oleh****Vera Maria****Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan ageng Tirtayasa****Email: vera.maria@untirta.ac.id****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengungkap perubahan perilaku sosial menyimpang dari adat istiadat dan norma agama melalui kesadaran beragama yang menumbuhkan efikasi diri untuk bertobat, dan peran tokoh masyarakat dalam penanganan penyakit masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dipandang relevan dalam mengungkap secara utuh perubahan perilaku seorang pekerja sek komersial yang menyadari pentingnya agama dalam kehidupannya, dan pentingnya keterlibatan peran tokoh masyarakat dalam penanganan penyakit masyarakat. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah seorang mantan pekerja sek komersial yang menjadi responden utama, dan seorang tokoh masyarakat. *Key informan* diperoleh dengan metoda *snow ball sampling*. Pendekatan triangulasi data digunakan untuk pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan penyakit masyarakat berdasar kesadaran agama menumbuhkan efikasi diri untuk dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan bermartabat. Dalam penelitian ini juga diperoleh temuan tentang peran tokoh masyarakat dalam penanganan penyakit masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi model dalam upaya menekan penyakit masyarakat.

Kata Kunci: Efikasi Diri, Kesadaran Beragama, Tokoh Masyarakat**PENDAHULUAN**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang (2017:39), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2016 menempati peringkat ke empat terbesar di Provinsi Banten, yaitu sebesar 1.484.502 juta jiwa. Salah satu faktor penyebab besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Serang adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,69 persen per tahun, sehingga dikhawatirkan suatu saat terjadi ledakan penduduk yang dapat berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama pada isu ekonomi dan sosial, seperti meningkatnya : (1) Pertumbuhan penduduk, (2) Unmeet Need KB Perempuan, yaitu perempuan pasangan usia subur yang ingin ber KB namun tidak memperoleh akses terhadap pelayanan kontrasepsi yang jumlahnya mencapai 5,3 persen per tahun, dimana sebagian besar dari

mereka tergolong dalam penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tinggal dikawasan yang rawan pangan, seperti di perbatasan wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar, sehingga terjadi disparitas dalam penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate- CPR) antar kabupaten/kota di Provinsi Banten, (3) Kebutuhan pangan penduduk (4) kebutuhan akan lahan perumahan dan pertanian, (5) alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, (6) supply tenaga kerja, (7) pengangguran dan kemiskinan, (8) pemukiman kumuh yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air maupun tanah dan (9) tingkat kejahatan/kriminalitas di dalam masyarakat karena sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga dapat menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan di Kabupaten Serang.

Di satu sisi, penurunan produksi padi bagi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Serang dari sebesar 510,747 ton pada tahun 2015 menjadi sebesar 496,351 ton pada tahun 2016, ternyata hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan LPP sebesar 0.69 persen pertahun atau dengan kata lain kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Serang, tidak diimbangi dengan kenaikan produksi padi, bahkan sebaliknya terjadi penurunan produksi padi, sehingga jika hal ini terus-menerus maka akan terjadi kekurangan/krisis pangan di Kabupaten Serang. Di sisi lain saat ini jumlah Unmeet Need KB perempuan di Kabupaten Serang telah mencapai 5.3 persen pertahun. Jika setiap pasangan Unmeet Need KB perempuan di melahirkan rata-rata 2 orang anak dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, maka jumlah keluarga Unmeet Need KB perempuan di Kabupaten Serang pada tahun 2021 akan bertambah minimal 2 kali lipat (10.6 persen).

Kondisi ini akan memberikan beban yang tinggi bagi Kabupaten Serang, ketika Kuantitas/jumlah penduduk meningkat, tetapi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan sangat rendah (Kuantitas yang besar tanpa dibarengi dengan peningkatankualitas SDM yang tinggi), maka sebagian besar dari mereka tidak dapat terserap di dunia industri (Suply tenaga kerja > Demand tenaga kerja). Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran yang tinggi, yang saat ini persentasenya telah mencapai 14.80 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Serang dan menempati peringkat pertama terkait jumlah pengangguran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2015.

Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Serang telah memicu meningkatnya jumlah penduduk miskin, tercatat pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 74.85 persen dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 67.92 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Serang. Tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Serang berpotensi dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti

kerawanan sosial, ekonomi dan lingkungan seperti meningkatnya kriminalitas/kejahatan di masyarakat, tawuran antar warga, demonstrasi anarkis, sengketa/perebutan lahan untuk pemukiman maupun pertanian, permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, perdagangan manusia, alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, serta munculnya permukiman kumuh yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air maupun tanah (BPS Kabupaten Serang, 2017:377).

Oleh karena itu dibutuhkan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) guna memberi kontribusi dan dampak positif terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan peningkatan peradaban manusia di Kabupaten Serang.

A. Rasional dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dan sesuai dengan Imillenium Development Goals (MDGs) dalam mendukung perilaku hidup berwawasan kependudukan (PHBK), dimana Kabupaten Serang menargetkan pada tahun 2018, laju pertumbuhan penduduk (LPP) turun menjadi 0.5 persen pertahun, total fertility rate (TFR) berkurang menjadi 2.1 persen, dan Unmeet Need KB perempuan turun menjadi 5 persen pertahun, sehingga dapat terealisasi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), maka perumusan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab: (1) Bagaimana trend kependudukan serta aspek-aspek kependudukan, khususnya Unmeet Need KB perempuan, (2) Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari tingginya Unmeet Need KB perempuan, (3) bagaimana upaya langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikn dampak dari tingginya Unmeet Need KB perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang.

Dalam jangka pendek, penelitian Analisis Dampak Unmeet Need KB Perempuan terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Serang ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis : (1) trend

kependudukan serta aspek-aspek kependudukan, khususnya Unmeet Need KB perempuan, (2) dampak sosial dan ekonomi dari tingginya Unmeet Need KB perempuan, (3) upaya atau langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya Unmeet Need KB perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di

Kabupaten Serang. Dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten Serang dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan strategi dan upaya yang tepat untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk khususnya Unmeet Need KB perempuan di Kabupaten Serang dari sisi ekonomi dan sosial.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 3 metode, yaitu analisis tabulasi, deskriptif dan Root Case Analysis (RCA). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan dalam : (1) aspek yang dikaji, yaitu aspek sosial dan ekonomi dari dampak tingginya Unmeet Need KB perempuan untuk mendukung Prilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) di Kabupaten Serang, (2), unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Unmeet Need KB perempuan (perempuan pasangan usia subur yang ingin ber KB namun tidak memperoleh akses terhadap pelayanan kontrasepsi, yang sebagian diantara mereka tergolong penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan tinggal di daerah rawan pangan seperti daerah perbatasan, daerah terpencil dan pulau terluar sehingga terjadi disparitas dalam penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate-ICPR antar kabupaten/kota di Provinsi Banten) untuk menjawab tujuan pertama digunakan metode tabulasi dan deskriptif. Metode tabulasi, deskriptif dan RCA digunakan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga.

Saat ini di Kabupaten Serang terjadi dilema transisi demografi, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bagi kelompok penduduk tertentu pada waktu yang bersamaan yaitu: (1) meningkatnya jumlah penduduk yang

tergolong Unmeet Need KB perempuan yang sangat membutuhkan kemudahan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi (KB) guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk, (2) anak-anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) yang sangat membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan energi pangan yang berguna untuk peningkatan ketahanan gizi balita itu sendiri (3) penduduk kelompok usia remaja memerlukan akses kesehatan, pendidikan dan keterampilan SDM yang lebih baik dan berkualitas agar menjadi tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja.

Kondisi tersebut dapat menjadi stimulus booming angkatan kerja di Kabupaten Serang (ketinggian/kelebihan supply tenaga kerja). Booming angkatan kerja ini dapat menjadi kesempatan besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang, akan tetapi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, maka Kabupaten Serang akan menghadapi beban pengangguran yang tinggi pada akhirnya dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya tingkat kejahatan/kriminalitas di masyarakat, kasus-kasus tawuran warga, permasalahan TKI diluar negeri, pergadangan manusia, timbulnya demonstrasi anarkis dan lain sebagainya. adapun dampak dari besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Serang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya ekonomi, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Selain itu faktor penyebab dari ledakan penduduk di Kabupaten Serang adalah: (1) meningkatnya Unmeet Need KB perempuan, (2) meningkatnya angka perkawinan pada pasangan usia muda/subur, (3) kurangnya sambutan yang baik dari masyarakat terhadap sosialisasi program KB dan (4) meningkatnya jumlah kelahiran penduduk.

Dari pemaparan diatas, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) pada aspek ekonomi, ketika jumlah penduduk meningkat, maka membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. jika tidak tersedia, maka ledakan penduduk usia kerja ini akan menimbulkan

dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Serang, yaitu pengangguran besar-besaran. Pada tahun 2014, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 530.551 pekerja, namun pada tahun 2015 dari setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya dapat menyerap 528.683 pekerja. Dengan adanya kurang lebih 2 ribu jiwa pengangguran, Pemerintah Kabupaten Serang harus dapat bekerja keras untuk dapat menanggulangi tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang (BPS Kabupaten Serang, 2017:51), (2) pada aspek sosial dan lingkungan, pertumbuhan penduduk yang besar terkait erat dengan aspek ekonomi ketika semakin banyak Unmeet Need KB perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di kawasan yang rawan pangan (pedesaan), serta tingginya tingkat pengangguran, maka akan menciptakan kehidupan sosial di Kabupaten Serang yang tidak harmonis antara masyarakat miskin yang hidup di desa dengan masyarakat menengah keatas yang banyak hidup di kota. Sangat ironis bahwa ketika sebagian besar masyarakat Kabupaten Serang yang tinggal di desa berada dalam kesulitan ekonomi namun terdapat sekitar 10 persen masyarakat menengah keatas. Jika tidak diperhatikan secara serius, maka isu ini sangat potensial untuk menjadi masalah besar yang mengancam kehidupan sosial di Kabupaten Serang.

Meningkatnya angka kriminalitas/kejahatan di masyarakat, kasus-kasus tawuran warga, permasalahan TKI di luar negeri, perdagangan manusia, sehingga banyak demonstrasi yang bersifat anarkis, serta munculnya pemukiman kumuh yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air maupun tanah menggambarkan betapa besarnya dampak kependudukan terhadap berbagai isu-isu baik ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga secara sangat jelas membutuhkan strategi analisis yang tepat untuk menentukan kebijakan yang akurat. Dari pemaparan ini maka dianggap penting untuk dilakukannya penelitian tentang “Analisis

Dampak Unmeet Need KB Perempuan Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Kabupaten Serang”.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ilmu Kependudukan

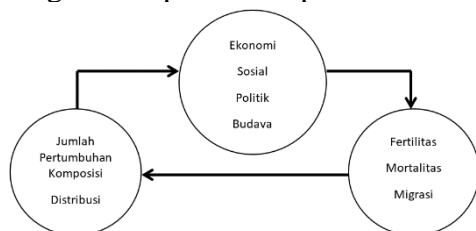
Ilmu kependudukan sebagai satu disiplin ilmu tidak dapat dipisahkan dari ilmu kesehatan masyarakat, karena dalam penyuluhan kesehatan pada masyarakat, maka yang paling urgent untuk diketahui adalah struktur dari suatu masyarakat itu sendiri dan pendekatan jenis apa yang harus dipakai untuk dapat berinteraksi di masyarakat. Multilingual Demographic Dictionary (1982) dalam Sri Moertiningsih Adioetomo (2008), mendefinisikan ilmu kependudukan adalah suatu ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur, komposisi penduduk, perkembangan dan perubahannya. Definisi lainnya dikemukakan oleh Philip M Hauser dan Dudley Duncan (1959) dalam Sri Moertiningsih Adioetomo (2008), ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran, tetorial, dan komposisi penduduk, serta perubahan dan penyebab perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak tetorial (migrasi), dan mobilitas sosial (perubahan status).

B. Keterkaitan Kependudukan dan Aspek Pembangunan

Perencanaan pembangunan sebaiknya berorientasi pada kependudukan (people centred development). Mengingat penduduk sebagai fokus dan dasar utama dalam berbagai aspek pembangunan. Kependudukan memegang peranan penting dalam pembangunan. Kemajuan suatu bangsa diukur berdasarkan indikator kependudukan, seperti jumlah pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk. Berbagai indikator kependudukan tersebut berpengaruh terhadap berbagai bidang tersebut juga berpengaruh terhadap fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk, pada akhirnya fertilitas, mortalitas, dan mobilitas

penduduk berperan dalam menentukan jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk, secara sederhana.

Keterkaitan kependudukan dan aspek pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Kependudukan dan Aspek Pembangunan

Sumber : Sri Moertiningsih Adiatoemo dan Lilis Heri Mis Cicih (2008)

Sehubungan dengan itu, diperlukan data kependudukan yang berkesinambungan sebagai sumber informasi bagi pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan dalam merencanakan pembangunan, baik secara nasional maupun regional dan lokal, sehingga dapat dikatakan bahwa semua rencana pembangunan memerlukan data kependudukan seperti jumlah, persebaran, komposisi menurut umur maupun jenis kelamin, dan data kependudukan lainnya yang relevan. Tanpa tersedianya data penduduk, sangat sulit membuat rencana pembangunan, baik fisik maupun sosial yang lebih tepat sasaran (Sri Moertiningsih dan Lilis Heri Mis Cicih, 2008).

C. Isu Strategis Kependudukan

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka perlu melihat berbagai masalah terkait kependudukan yang terjadi sampai saat ini, sehingga dapat dirumuskan berbagai isu strategis bidang kependudukan, sebagai berikut: (a) jumlah penduduk besar yang terus bertambah, (b) ledakan penduduk usia kerja muda, (c) jumlah penduduk lansia meningkat, (d) Mobilitas penduduk meningkat, (e) data kependudukan yang belum memadai, (f) Kualitas manusia rendah (Sri Moertiningsih dan Lilis Heri Mis Cicih, 2008).

D. Penelitian Terdahulu

1. Dampak Sosialisasi, Ekonomi, dan Lingkungan dari Ledakan Penduduk

Mimi (2010), dalam penelitiannya yang berjudul Kajian Teori Malthus Terhadap Populasi dan Pangan (Studi Kelembagaan di Kota Banjar Masin, Kalimantan Selatan), berpendapat bahwa kepadatan penduduk merupakan masalah yang banyak di alami beberapa kota di Indonesia, seperti Kota Banjarmasin. Ledakan penduduk di Kota Banjarmasin telah berdampak buruk pada aspek lingkungan maupun sosial, adapun dampak buruk yang terjadi dari ledakan penduduk di Kota Banjarmasin pada aspek lingkungan adalah munculnya pemukiman kumuh yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara, air, maupun tanah. sedangkan dampak sosial dari ledakan penduduk di Kota Banjarmasin ternyata menimbulkan rasa frustrasi dan distorsi pada norma kehidupan di masyarakat, seperti mudahnya terjadi konflik, meningkatnya angka kriminalitas dan tindakan anarkis di masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan transmigrasi penduduk, mengoptimalkan lahan dengan bantuan kemajuan teknologi dan pemerataan pembangunan di pedesaan. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat ledakan penduduk di Kota Banjarmasin. serta diharapkan juga adanya perubahan dalam bidang kelembagaan, baik pada level kelembagaan sosial, formal, dan tata kelola pemerintahan secara kontinyu ke arah yang lebih baik. hubungan antara teori Malthus dengan kondisi yang terjadi di Kota Banjarmasin tidak berlaku karena kemajuan teknologi pertanian dan teknologi kesehatan mampu meningkatkan produksi pangan dan mengontrol fertilitas masyarakat di Kota Banjarmasin.

Penelitian dampak negatif yang terjadi akibat ledakan penduduk dan cara mengatasinya (Sandra Dyana, 2011), memperlihatkan bahwa salah satu dampak lingkungan yang terjadi akibat ledakan penduduk adalah tingginya polusi udara. tingkat polusi udara bergerak naik seiring

dengan semakin banyaknya jumlah penduduk disuatu area pemukiman. Polusi udara terbanyak ditimbulkan dari sisa-sisa hasil pembuangan asap pabrik/industri dan kendaraan bermotor yang jumlahnya saat ini semakin meningkat tajam. hal ini terjadi dari banyaknya pabrik/industri yang tumbuh dan semakin tingginya frekuensi kemacetan yang terjadi di jalan-jalan yang membuat jalan dikota tidak lancar lagi untuk dilalui. ujung dari akibat ledakan penduduk adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampak ikutannya, seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang di telantarkan serta hilang fungsinya sebagai ruang terbuka.

Sedangkan dampak sosial yang terjadi akibat ledakan penduduk adalah kemiskinan. Banyaknya jumlah penduduk miskin, kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori. dengan demikian penyakit masyarak miskin pada umumnya berkaitan dengan penyakit menular seperti diare, lever, TBC, dan kekurangan gizi termasuk busung lapar terutama pada bayi. kematian bayi adalah konsekuensi dari penyakit yang ditimbulkan karena kemiskinan.

Ledakan penduduk merupakan masalah yang harus segera ditangani dengan serius oleh pihak-pihak yang terkait, sebab jika permasalahan ini terus berlanjut akan mengakibatkan dampak negatif yang lebih banyak lagi. Solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ledakan penduduk, yaitu melakukan program: (1) transmigrasi untuk memindahkan kelompok penduduk dari satu tempat ketempat yan lain, (2) Keluarga berencana (KB) yang dapat mencegah kelahiran terlalu banyak anak, dan (3) mengoptimalkan lahan dengan menggunakan teknologi. Hal ini disebabkan padatnya lahan yang tadinya untuk menanam tanaman pangan beralih fungsi sebagai lahan permukiman. peralihan fungsi ini membuat penurunan terhadap produksi pangan sehingga penduduk mengalami kekurangan pangan, Oleh

karena itu diperlukan penggunaan teknologi agar dapat meningkatkan produksi pangan walaupun lahan sempit, dan (4) pemerataan pembangunan antar kota dan desa, Hal ini dapat di lihat bahwa selama ini pembangunan dan kegiatan ekonomi terpusat di kota. Seharusnya pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota tetapi juga dilakukan di desa. Jika pembanunan dilakukan secara merata maka sangat kecil kemungkinan penduduk yang tinggal di desa pindah kota.

Pada penelitian lainnya, Leli (2009) dalam penelitiannya dengan judul Masalah-masalah Timbul dari Ledakan Penduduk Di Suatu Negara, mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengendalikan ledakan penduduk di suatu negara adalah diberikannya: (1) insentif dan sanksi, dimana insentif akan diberikan pada pasangan dengan sedikit anak, sementara pasangan yang memiliki banyak anak akan diberi sanksi, seperti harus membayar pajak lebih besar. Cina merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan metode insentif dan sanksi. seperti diketahui bahwa Cina tahun 2012, jumlah penduduknya sekitar 2milyar jiwa (22 persen dari total penduduk dunia). sejak tahun 1979, pemerintah Cina mengkampanyekan kebijakan satu anak satu pasangan. setiap pasangan diCina hanya diperbolehkan memiliki anak satu. jika pasangan memiliki lebih dari satu anak tanpa ijin pemerintah, maka hal ini di anggap ilegal, (2) pendidikan tentang keluarga berencana (KB). pada beberapa negara, pasangan suami istri diberi beberapa pendidikan tentang beberapa cara untuk mengendalikan jumlah anak. contohnya di Banghlades, dimana lebih dari 24.000 wanita setiap tahunnya dikirim kedaerah perkotaan untuk diajak dan diberikan penyuluhan KB, sehingga diharapkanpara wanita tersebut bisa mengatur jumlah anak. Di Indonesia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan dengan kampanye program KB. program ini mengajarkan kepada pasangan suami istri untuk memiliki hanya dua anak saja, laki-laki atau perempuan sama saja. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah

menerapkan program insentif, yakni tunjangan anak. sejalan dengan kampanye KB, tunjangan anak bagi PNS hanya diberikan kepada anak kedua saja. Hal ini diberlakukan dengan tujuan agar pasangan suami istri membatasi jumlah anak.

2. Dampak Kebijakan Kependudukan terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan untuk Mendukung Prilaku Hidup Berwawasan Kependudukan.

Uzen (2010) menerangkan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kepadatan Populasi Manusia Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, bahwa dampak dari ledakan penduduk dari sisi: (1) Sosial, seperti urbanisasi, penduduk tidak merata, angka kemiskinan dan kriminalitas meningkat akibat moralitas menurun, (2) Ekonomi, dimana kebutuhan akan pangan dan lahan sebagai tempat hunian serta industri semakin meningkat, sedangkan lahan yang tersedia semakin sedikit/menurun, (3) Pendidikan, tingkat pendidikan menurun karena biaya pendidikan meningkat, (4) Kesehatan, saat ini penurunan kualitas lingkungan dan meningkatnya berbagai penyakit, sehingga kualitas kesehatan masyarakat menurun, (5) Lingkungan hidup, dimana sekarang ini telah terjadi : (a) kerusakan ekosistem, seperti kerusakan hutan akibat ladang berpindah, kekurangan air, kekurangan oksigen, keterbatasan lahan, dan penebangan pohon secara liar, (b) pencemaran dan polusi meningkat, akibat dari kerusakan ekosistem dan pertumbuhan industri serta penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, sehingga tingkat pencemaran dan polusi tidak terkendali, hal ini dilihat semakin banyaknya limbah industri rumah tangga serta asap kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi air, tanah dan udara, adapun usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi ledakan penduduk adalah: (1) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan menyelenggarakan program KB, (2) Meningkatkan kualitas penduduk dengan cara meningkatkan gizi balita, menunda perkawinan usia dini (kawin muda), prinsip-prinsip

pendidikan ekologi dan pengenalan prilaku hidup berwawasan kependudukan, seperti program pendidikan 9 tahun, menghapuskan buta huruf, Meningkatkan pencegahan, pengobatan dan penanggulangan penyakit pada ibu dan anak, (3) Meningkatkan lapangan pekerjaan dengan mengembangkan industri dan keterampilan masyarakat agar mandiri, dan (4) Mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan produksi pangan, melalui program intensifikasi, yaitu peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan cara bercocok tanam yang dilakukan dengan lahan sempit atau terbatas, ekstensifikasi atau peningkatan produksi pertanian melalui perluasan lahan, diversifikasi, yakni penganeekaragaman jenis makanan, serta mencari sumber makanan baru.

Penelitian Ancaman Ledakan Penduduk (Population bomb) Terhadap Kemakmuran dan Peradaban Manusia Jawa Barat yang dilakukan oleh Uum Darum Baksara (2009), mengemukakan ledakan penduduk (population bomb) di Jawa Barat akan mengancam dan berdampak negatif terhadap semua aspek kehidupan dan semua sektor pembangunan, yang pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kemakmuran dan peradaban manusia Jawa Barat di masa kini dan masa yang akan datang, semua hasil pembangunan di segala bidang pembagiannya adalah penduduk. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tidak akan melaju jika pertumbuhan penduduknya (LPP) terus meningkat tidak terkendali, oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan secara berkesinambungan agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jawa Barat dapat terwujud.

Salah satu program yang menyangkut tentang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga adalah program kependudukan dan keluarga berencana nasional untuk mendukung prilaku hidup berwawasan kependudukan, program ini harus dapat perhatian penuh dan berkesinambungan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk itu sendiri, dan sebagai pelaksanaan dari apa yang di amanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah ledakan penduduk dan permasalahannya adalah: (1) terus meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap remaja sebagai cikal bakal timbulnya keluarga baru mengenai pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), bahaya dari seks bebas, narkoba/NAFZA, HIV/AIDS, pendidikan keterampilan hidup (life skill education), serta pendidikan kehidupan berumah tangga bagi remaja (family life education), (2) terus meningkatkan pengendalian kelahiran dengan menggunakan obat dan alat kontrasepsi, (3) terus meningkatkan pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR dan BKL, (4) terus meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui UPPKS, (5) terus meningkatkan administrasi pencatatan danpelaopan serta administrasi kependudukan lainnya, (6) kualitas penduduknya terus ditingkatkan dan (7) mobilitas penduduknya terus diatur dan diarahkan. Dengan upaya tersebut diharapkan ledakan penduduk dapat terkendali, sehingga permasalahan dan ancaman dapat dihindari, yang menjadikan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat terwujud di setiap keluarga yang akhirnya memberi kontribusi dan berdampak positif terhadap kesejahteraan dan kemakmuran serta peradaban manusia Jawa Barat.

3. Unmet Need Keluarga Berencana dan Arah Kebijakan Program Keluarga Berencana di Indonesia

Dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia terutama bagi Unmet need KB dan untuk mendukung perilaku hidup berwawasan lependudukan, sebagai berikut: (1) memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin, berpendidikan rendah, PUP, MUPAR, daerah perdesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan dan daerah dengan unmet need KB tinggi, (2) peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat kontrasepsi (alkon) MKJP,

(3) Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga dan individu unmet need KB untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai macam penyakit seksual dan alat reproduksi, (4) peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga dan pendewasaan usia perkawinan, (5) peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak serta pembinaan kualitas hidup secara terpadu, (6) pemberdayaan ketahanan keluarga akseptor KB untuk mewujudkan kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya (7) mengoptimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE program KB nasional, (8) pembinaan kuantitas dan kualitas SDM di lini lapangan dan kualitas manajemen pengelolaan program KB nasional, (9) peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KB nasional (BKKBN,2012).

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Periode/Lama Penelitian, serta Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Serang dengan alasan jumlah unmet need KB perempuan di Kabupaten Serang, yaitu perempuan pasangan usia subur yang ingin ber KB namun tidak memperoleh akses terhadap layanan kontrasepsi, yang sebagian besar mereka tergolong dalam penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di kawasan rawan pangan, seperti di perbatasan wilayah terpencil, dan pulau-pulau terluar sehingga terjadi disparitas dalam penggunaan kontrasepsi di kabupaten/kota Provinsi Banten tergolong tinggi, yaitu 5.3 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Serang. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, yang dimulai dari bulan Mei-Oktober 2014.

Data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan metode purposive random sampling. Sampel yang diambil adalah unmet need KB diwawancarai dengan menggunakan instrument kuisioner. Data primer yang diperlukan antara lain: (1) karakteristik/identitas rumah tangga dan prilaku rumah tangga unmet need kb perempuan, (2) kemudahan dan kesulitan yang dihadapi unmet need KB perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan khususnya kontrasepsi, pendidikan dan penyuluhan keluarga berencana (KB), (3) PHBK unmet need KB perempuan. (4) dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan Unmet need KB perempuan yang mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kontrasepsi, pengumpulan data sekunder diperoleh dari kantor perwakilan BKKBN dan BPS Kabupaten Serang, Kantor Kecamatan dan desa, serta lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Tahapan Analisis

Penelitian tentang Analisis Dampak Unmet Need KB Perempuan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi di Kabupaten Serang ini dimulai dari identifikasi masalah aktual yang terjadi di daerah untuk dapat memberikan solusi optimal (kebijakan) dan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya Unmet Need KB Perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang.

Tahapan dari analisis tersebut sebagai berikut: (1) mengestimasi trend kependudukan serta aspek-aspek kependudukan, khususnya Unmet Need KB Perempuan. (2) Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari tingginya Unmet Need KB Perempuan (3) mengestimasi dan menganalisis upaya atau langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya Unmet Need KB Perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang, berdasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh berupa upaya-upaya yang optimal dan dapat diterapkan, yaitu bagaimana strategi, target dan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan harus dilakukan khususnya oleh

perwakilan BKKBN, Pemerintah Kabupaten Serang, dan masyarakat pada umumnya untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya Unmet Need KB Perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang.

Kerangka dasar penelitian Analisis Dampak Unmet Need KB Perempuan Terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang ini menggunakan 3 metode, yaitu analisis tabulasi, deskriptif, dan root case analysis (RCA). Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan dalam: (1) aspek yang dikaji, yaitu aspek sosial dan ekonomi dari dampak tingginya Unmet Need KB Perempuan untuk mendukung Prilaku Hidup Berwawasan Kependudukan (PHBK) di Kabupaten Serang, (2) unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Unmet Need KB Perempuan (perempuan pasangan usia subur yang ingin ber KB namun tidak memperoleh akses terhadap pelayanan kontrasepsi, yang sebagian besar dari mereka adalah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tinggal dikawasan rawan pangan seperti di perbatasan, wilayah terpencil, dan pulau-pulau terluar sehingga terjadi disparitas dalam penggunaan kontrasepsi. (Contraceptive Prevalence Rate-CPR) antar kabupaten/kota di provinsi Banten). Untuk menjawab tujuan pertama digunakan metode tabulasi dan deskriptif, metode tabulasi dan RCA digunakan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga.

C. Model Analisis

Penelitian tentang Analisis Dampak Unmet Need KB Perempuan Terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi Di Kabupaten Serang, bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis : (1) Trend kependudukan serta aspek-aspek kependudukan khususnya Unmet Need KB Perempuan, (2) dampak sosial dan ekonomi dari tingginya Unmet Need KB Perempuan, (3) upaya atau langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya Unmet Need KB Perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang. Untuk menjawab tujuan pertama digunakan metode tabulasi dan

deskriptif, metode tabulasi, deskriptif dan RCA digunakan untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga (tabel 1).

Dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Serang dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan strategi dan upaya yang tepat untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk khususnya Unmet Need KB Perempuan di Kabupaten Serang dari sisi sosial dan ekonomi.

Tabel 1. Kesesuaian antara Tujuan Penelitian dengan Metode Analisis

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Metode Analisis
1	Mengestimasi <i>Trend</i> kependudukan serta aspek-aspek kependudukan khususnya <i>Unmet Need</i> KB Perempuan	Data sekunder. Data sekunder : BKKBN, BPS Serang, dan Lain-lain	Metode Tabulasi dan Deskriptif
2	Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari tingginya <i>Unmet Need</i> KB Perempuan	Data primer dan data sekunder. Data Sekunder : BKKBN, BPS Serang dan lainnya. Data primer : Wawancara dengan responden (<i>Unmet Need</i> KB Perempuan)	Metode tabulasi, deskriptif dan RCA
3	Mengestimasi dan menganalisis upaya atau langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya <i>Unmet Need</i> KB Perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang	Data sekunder: BKKBN, BPS Serang dan lain-lain	Metode tabulasi, deskriptif dan RCA

Tabel 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti Pembagian Tugas

Nama	Bidang Ilmu	Alokasi waktu (Jam/Minggu)	Uraian Tugas
Vera Maria, SE.,MM	Ilmu Ekonomi	12 jam/minggu	Melaksanakan pembuatan proposal, validasi data, melakukan <i>networking</i> dengan pihak yang terkait, <i>mendisegn</i> format laporan dan menyusun laporan akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis jawaban responden tentang alasan mereka menjadi unmet need dikarenakan adanya faktor budaya atau kebiasaan yang sudah menjadi kepercayaan mereka secara turun temurun. Unmet need adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menginginkan anak, menginginkan anak dengan jarak 2 tahun atau lebih tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kelompok unmet need merupakan sasaran yang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan program KB (Katulistiwa, 2013). Ada beberapa alasan individu tidak menggunakan metode KB diantaranya kesuburan yang mencakup pramenopause dan histerektomi, keinginan memiliki banyak anak, efek samping dari kontrasepsi yang digunakan, kekhawatiran terhadap efek samping. Serta bagi pria alasan tidak ber KB karena berkaitan dengan kesuburan dan terkait dengan alat/cara KB. Alasan lainnya meliputi responden yang menentang memakai kontrasepsi (Individu menolak, suami/pasangan menolak, orang lain menolak, larangan agama), kurang pengetahuan (alat/cara KB, sumber), jarak yang jauh dari tempat pelayanan, biaya kontrasepsi terlalu mahal, dan merasa tidak nyaman (SDKI, 2012).

Faktor yang berpengaruh terhadap unmet need di Indonesia disebabkan oleh faktor demografi dan social ekonomi. Beberapa penelitian telah mengungkap factor penyebab unmet need diantaranya kurangnya pengetahuan tentang KB, kurangnya dukungan suami dan budaya yang masih dipegang teguh oleh pasangan usia subur. Penelitian dan studi yang dilakukan di Gwalior mengemukakan bahwa faktor unmet need yaitu dukungan suami dan paparan informasi. Studi di India mengemukakan bahwa agama, dukungan suami dan pekerjaan (status ekonomi) menjadi faktor unmet need (Muniroh dkk, 2013). Pandangan masyarakat terhadap program KB sebagian kurang mendukung dikarenakan masyarakat yang tinggal dipedesaan. Mengajak seseorang untuk mengikuti program KB, berarti mengajak

mereka untuk meninggalkan nilai norma lama. Nilai-nilai lama tersebut adanya anggapan bahwa anak adalah jaminan hari tua, khususnya dalam masyarakat agraris, semakin banyak anak semakin menguntungkan bagi keluarga dalam penyediaan tenaga kerja dalam bidang pertanian, kedudukan anak laki-laki sebagai faktor penerus keturunan masih sangat dominan, karena tidak memiliki keturunan laki-laki di kalangan kelompok masyarakat tertentu berarti putusnya hubungan dengan Silsila kelompok (Usman L, 2013)

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil analisis mengungkapkan, maka peneliti mengambil kesimpulan, atas hasil observasi yang diperoleh ditetapkan Dampak efek unmeet need kb perempuan berpengaruh positif hasil akan tetapiantisipasi jangan terlalu tinggi meningkat hal ini tidak bagus untuk pertumbuhan perempuan, hasil ini didapatkan dari fakta realita langsung identifikasi masalah aktual yang terjadi di daerahkan untuk dapat memberikan solusi optimal (kebijakan) dan menggunakan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari tingginya Unmet Need KB Perempuan terhadap aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang.

Saran.

Peneliti menyarankan bahwa seseorang untuk mengikuti program KB, sehingga mereka dapat meninggalkan nilai norma lama. Begitu juga nilai-nilai lama tersebut bahwa anak adalah jaminan hari tua, khususnya dalam masyarakat agraris, semakin banyak anak semakin menguntungkan bagi keluarga dalam penyediaan tenaga kerja dalam bidang pertanian, kedudukan anak laki-laki sebagai faktor penerus keturunan masih sangat dominan, karena tidak memiliki keturunan laki-laki di kalangan kelompok masyarakat tertentu.

DAFTAR PUSAKA

- [1] Bharadwaj, L.K. 2013. Human Ecology and The Environment dalam E.F Borgatta and M.L Borgatta (eds) Encyclopedia of Sociology. Volume 2. New Macmillan Publishing Company.
- [2] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten. 2015. Isu-isu Strategis dalam Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi. BKKBN Provinsi Banten. Serang.
- [3] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2015. Analisis Persebaran/Distribusi dan Mobilitas Penduduk di Provinsi Banten. Untirta. Banten.
- [4] ----- . 2015. Strategi Meningkatkan Ketersediaan dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Bagi Masyarakat di Provinsi Banten. Untirta. Banten.
- [5] ----- . 2015. Analisis Dampak Peningkatan Penduduk Pada Capaian dan Kualitas Pendidikan di Provinsi Banten. Untirta. Banten.
- [6] ----- . 2015. Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk dan Dampaknya Terhadap Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan Pada Urban Area di Provinsi Banten. Untirta. Banten.
- [7] Badan Pusat Statistik. 20012. Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [8] ----- . 2012. Penduduk Indonesia. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [9] ----- . 2015. Hasil Sensus Penduduk 2017. Data Agrerat per Provinsi. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- [10] Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan United Nations Population Fund. 2016. Proyeksi Penduduk Indonesia 2016-2025. Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional dan United Nations Population Fund. Jakarta.

- [11]Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. 2017. Kabupaten Serang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang. Serang